

PENGARUH ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

Sarito Pasuria¹, Nunuk Triwahyuningtyas²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: ¹sarito.pasuria@upnvj.ac.id | ²nunukwowo@gmail.com

Abstract

The phenomenon of employment that often occurs in Indonesia is unemployment. The high unemployment rate will have a direct impact on various aspects of life, especially socio-economic aspects. Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that are thought to have an effect on unemployment, namely the labor force, education, minimum wage, and gross domestic product (GDP). The data source used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency. Multiple linear regression analysis (Ordinary Least Squares) with time series data for 1990-2020 was used as a data analysis technique in this study. This research is supported by tools in the form of EViews 10 and Microsoft Excel 2019 to test hypotheses with a significance level of 5% (0.05). Based on the test results, the labor force, education, minimum wage, and gross domestic product simultaneously affect unemployment in Indonesia. On the other hand, partially the labor force, education, and minimum wage have a significant effect on unemployment, but GDP has no effect on unemployment in Indonesia.

Keywords: unemployment, labor force, education, minimum wages, gross domestic product.

Abstrak

Fenomena ketenagakerjaan yang acap kali terjadi di Indonesia adalah pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan dampak langsung pada berbagai aspek kehidupan khususnya aspek sosial ekonomi. Oleh sebab itu, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengangguran, yakni angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto (PDB). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares*) dengan data *time series* tahun 1990-2020 digunakan sebagai teknik analisis data pada penelitian ini. Adapun penelitian ini ditunjang oleh alat bantu berupa EViews 10 dan Microsoft Excel 2019 untuk melakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil uji, angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia secara simultan. Di sisi yang berbeda, secara parsial angkatan kerja, pendidikan, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, namun PDB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.

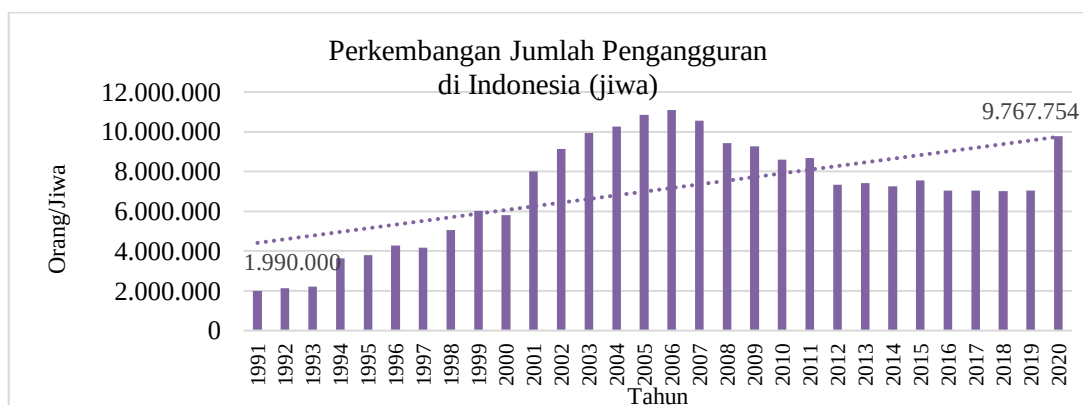
Kata kunci: pengangguran, angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, produk domestik bruto

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak luput dari masalah pengangguran. Sejatinya, tingkat pengangguran yang tinggi akan menurunkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Kondisi ini merupakan konsekuensi lantaran banyak tenaga kerja yang siap kerja tidak tertampung ke dalam lapangan kerja yang tersedia hingga mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokoknya. Instabilitas angka pengangguran dari tahun ke tahun di Indonesia membuktikan belum terciptanya kesempatan kerja penuh.

Kondisi ini didukung oleh teori umum ketenagakerjaan dari John M. Keynes (1936) yang mengungkapkan bahwa dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh di pasar tenaga kerja tidak akan tercipta. Lebih lanjut, teori ini juga menjelaskan bahwa pengangguran terjadi akibat adanya penerapan upah efisiensi dimana upah melewati tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang mengakibatkan turunnya perputaran tenaga kerja sehingga menimbulkan masalah pengangguran.

Jumlah pengangguran yang berfluktuatif pada penelitian ini merepresentasikan fenomena ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas pembangunan ekonomi. Berikut terlampir perkembangan jumlah pengangguran dari tahun 1990-2020 di Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 1990-2020

Pada Grafik 1, Jumlah pengangguran terendah di Indonesia tercatat pada tahun 1990 sebesar 1.910.000 orang, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2000 naik pesat mencapai 5.810.000 jiwa. Hal ini terjadi lantaran terdapat kenaikan yang cukup masif pada populasi penduduk usia produktif. Selain itu, pada akhir tahun 1990-an, fenomena krisis keuangan Asia turut memperparah kondisi pengangguran sebab mayoritas pekerja kehilangan pekerjaan hingga mengharuskan pekerja beralih dari kota ke desa menggeluti sektor informal seperti pertanian (Tambunan 2018). Pada tahun 2006, Indonesia mencetak jumlah pengangguran tertinggi mencapai 11.100.000 orang. Hal ini merupakan dampak dari peristiwa melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan naiknya suku bunga perekonomian. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran dari tahun 2007 mulai menunjukkan penurunan menjadi 10.550.000 orang. Kemudian, tahun 2012 jumlah penganggur kembali menurun menjadi 7.344.870 juta orang. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor adanya percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan banyak lapangan kerja baru. Namun, di tahun berikutnya tahun 2013, jumlah pengangguran meningkat menjadi 7.410.930 orang lantaran terjadi depresiasi rupiah. Tahun 2015, jumlah pengangguran di Indonesia kembali tumbuh sebesar 4,36% dari tahun sebelumnya hingga menjadi 7.560.820 orang. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya perlambatan ekonomi hingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan data yang dikutip dari *ASEAN Secretariat*, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,6% pada tahun 2016. Tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 5,5 persen. Tingkat pengangguran Indonesia kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2018

menjadi 5,3% dan tetap stabil di angka 5,3% pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, trend tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2016-2019 memang mengalami penurunan, akan tetapi bila dilakukan komparasi dengan negara berkembang lain di Asia Tenggara, tingkat pengangguran Indonesia nyatanya masih terbilang tinggi. Pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi pertama tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN hingga tahun 2019 tercatat Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara atau berada di atas Malaysia (3,3%), Vietnam (2,2%), dan Thailand (1,0%). Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut mengindikasikan belum optimalnya kebijakan dan strategi pemerintah dalam menangani persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, menurut BPS jumlah pengangguran Indonesia sekali lagi menunjukkan peningkatan yang tajam sebanyak 9.767.754 orang. Hal ini disebabkan karena merebaknya virus *Covid-19* yang menimpa seluruh dunia dan mempengaruhi berbagai lini kehidupan khususnya ekonomi. Dari sektor ketenagakerjaan, terjadi PHK dan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia.

Dengan menempati posisi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia senantiasa mengalami eskalasi jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Tahun 1990, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 77.8 juta orang hingga tahun 2020 mencapai 138.2 juta orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 41.74% dalam kurun waktu 31 tahun. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak disertai pertumbuhan kesempatan kerja akan menimbulkan jumlah penganggur yang terus membesar (Ryan Z, Istiyani, dan Hanim 2017).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengangguran adalah pendidikan. Untuk memperoleh peluang kerja yang luas dan produktivitas yang tinggi, diharapkan setiap individu memiliki akses pendidikan hingga ke jenjang tinggi. Kondisi ini terjadi lantaran tuntutan perusahaan yang menginginkan kualifikasi pekerja yang berkualitas dan biasanya dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan (Fitri dan Junaidi 2016).

Upah minimum diduga kuat mempengaruhi kondisi pengangguran. Penetapan tingkat upah minimum memberikan implikasi terhadap fenomena tingkat pengangguran. Tingginya upah minimum yang ditetapkan mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja. Dengan pengertian sederhana, semakin tinggi tingkat upah minimum maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran (Suhendra dan Wicaksono 2016).

Mengacu pada teori dan studi sebelumnya, Produk Domestik Bruto (PDB) juga dapat mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia. PDB merupakan total nilai produksi yang diciptakan dari wilayah domestik yang dimanfaatkan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Apabila total PDB suatu negara meningkat, artinya sudah berlaku kenaikan atas permintaan produksi baik barang atau jasa. Lebih lanjut, eskalasi output tersebut akan mempengaruhi kenaikan faktor produksi lain salah satunya ialah faktor tenaga kerja. Peningkatan permintaan SDM tersebut akan turut membantu menurunkan angka pengangguran (Maravian, Qosjim, dan Khomariyah 2015). Dari uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia?
- d. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap pengangguran di Indonesia?

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan masalah yang dapat diperoleh adalah untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto terhadap pengangguran di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengangguran

Mengutip teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes melalui bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), Keynes melontarkan pandangannya mengenai ketenagakerjaan. Menurut Keynes, pemanfaatan tenaga kerja penuh (*full employment*) sangat langka terjadi sehingga pengangguran akan terus berlaku dalam perekonomian lantaran rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Lebih lanjut, Keynes menggolongkan pengangguran menjadi pengangguran tipe siklikal dan struktural. Pengangguran tipe siklikal terjadi lantaran adanya ketidakseimbangan permintaan. Sementara, tipe pengangguran struktural bermula dari adanya gejala struktural dimana terjadi ketimpangan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan baru. Adapun penyebab masalah struktural ini disebabkan oleh faktor geografis, usia, sejarah, serta diskriminasi terkait jenis kelamin dan suku (Setiawan, Muchtar, dan Muafiqie 2017).

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah tingkat upah lantaran terjadinya kekakuan upah atau tidak fleksibelnya upah sehingga terjadinya ketidaksempurnaan di sisi penawaran tenaga kerja (Davidson 2007). Kekakuan upah ini terjadi disebabkan oleh tiga faktor, diantaranya undang-undang upah minimum, upah efisiensi, dan serikat pekerja. Akan tetapi, teori ini belum menjelaskan peranan variabel pendidikan dan produk domestik bruto (PDB) berkenaan dengan masalah pengangguran, dimana akan digambarkan dalam teori Modal Manusia (*Human Capital*) dan Hukum Okun (*Okun's Law*) yang masing-masing menjelaskan faktor pendidikan dan PDB menjadi penentu tingkat pengangguran.

Teori Pendidikan

Istilah modal manusia atau *Human Capital* dalam ilmu ekonomi mengacu pada keterampilan dan pengetahuan yang diterima angkatan kerja melalui pendidikan dan jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas angkatan kerja (Todaro dan Smith 2011).

Investasi bidang modal manusia dianalogikan layaknya investasi konvensional dalam modal fisik dimana modal manusia juga senantiasa berperan dalam meningkatkan kemampuan sebuah negara dalam memproduksi barang atau jasa dan keberhasilan ekonomi dalam jangka panjang (Mankiw 2018). Tingginya jenjang pendidikan yang ditoreh akan semakin luas pula kesempatan kerja yang diperolehnya dan kondisi ini dapat mengurangi pengangguran (Suhendra dan Wicaksono 2016).

Teori Produk Domestik Bruto (PDB)

Konsep pendapatan nasional paling esensial di negara berkembang adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP). Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang bersumber dari dalam negeri dan negara asing di suatu negara disebut sebagai PDB (Sukirno 2016).

Dalam Hukum Okun (*Okun's Law*) yang dikemukakan Arthur Melvin Okun (1962) dijelaskan bahwa terdapat korelasi yang bersifat negatif antara pengangguran dan PDB. Lebih lanjut, teori tersebut mempelajari bahwa sumber daya manusia (SDM) yang bekerja akan menciptakan barang atau jasa, tetapi SDM yang tidak dipekerjakan tak menghasilkan apapun akibatnya kondisi ini berimplikasi terhadap penurunan GDP riil (Mankiw 2006).

Setiap kenaikan PDB mendekati angka 2 persen maka akan terjadi penurunan pengangguran sebesar 1 persen sebab apabila PDB suatu negara turun, hal ini dapat diartikan bahwa terjadi penurunan tingkat produksi lantaran rendahnya konsumsi yang datang dari masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja (Tutupoho 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif untuk menganalisa pengaruh angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto terhadap pengangguran. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat runtun waktu (*time series*) dalam periode 1990-2020 berjumlah 31 tahun yang diperoleh dari BPS. Data diolah menggunakan software EViews 10 dan Microsoft Excel 2019. Adapun objek penelitian ini adalah negara Indonesia dengan populasi penelitian, yaitu pengangguran di Indonesia (Y) sebagai variabel terikat, sedangkan angkatan kerja (X1), pendidikan (X2), upah minimum (X3), dan produk domestik bruto (X4) sebagai variabel bebas.

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Kemudian, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis linear berganda dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) sebab penelitian ini dirancang untuk meneliti hubungan independen terhadap variabel dependen. Pada konteks penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pengangguran Indonesia yang dipengaruhi oleh angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto. Berikut model regresi linear berganda:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Pengangguran
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien
X1	= Angkatan Kerja
X2	= Pendidikan
X3	= Upah Minimum
X4	= Produk Domestik Bruto
et	= error term

Untuk menggeneralisasi satuan data penelitian yang berbeda, maka model regresi penelitian menggunakan logaritma berganda dengan cara melakukan transformasi persamaan regresi ke dalam bentuk logaritma natural (LN). Satuan variabel upah minimum dan PDB dalam bentuk rupiah serta angkatan kerja dalam bentuk jiwa perlu ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk persen (%) (Benny 2013). Hasil transformasi persamaan regresi dapat ditunjukkan hasilnya di bawah ini:

$$PGG = \beta_0 + \beta_1 \text{LnAK} + \beta_2 \text{PDD} + \beta_3 \text{LnUM} + \beta_4 \text{LnPDB} + e$$

Keterangan:

Y	= Pengangguran
LnAK	= Log natural Angkatan Kerja
PDD	= Pendidikan
LnUM	= Log natural Upah Minimum
LnPDB	= Log natural Produk Domestik Bruto
β_0	= Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien
e = Error Term

Supaya model pada data penelitian memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) atau tidak bias, maka tahap awal dilakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Langkah terakhir adalah uji signifikansi yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen yang terdiri atas uji statistik t (parsial), uji F (simultan), serta uji koefisien determinasi *R-squared* dan *adjusted R-squared*.

HASIL PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan guna melihat apakah dalam model regresi variabel independen dan bebas maupun keduanya memberi distribusi normal atau tidak. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera > 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa *error term* terdistribusi dengan normal begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan hasil uji normalitas yang dihasilkan.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	0.530557
Probability	0.766992

Sumber: Hasil olah data EViews 10

Berdasarkan hasil uji normalitas yang termuat pada Tabel 1, nilai *probability* Jarque-Bera senilai $0.766992 > 0.05$ yang artinya residual terdistribusi normal dan bermakna asumsi klasik tentang normalitas sudah terpenuhi atau tidak terdapat masalah normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji model regresi apakah ada ketidaksamaan varian residual satu dari pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas ini memakai metode uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. Jika nilai probabilitas < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya. Terlihat pada tabel di bawah ini hasil pengujian untuk uji heteroskedastisitas:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-Squared	Prob. Chi-Square(4)
9.035702	0.0602

Sumber: Hasil olah data EViews 10

Berdasarkan hasil uji *Breusch-Pagan-Godfrey* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.0602 lebih besar dari tingkat alpha 0.05 sehingga terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian dilakukan untuk mengetahui antara residual pada periode tahun sekarang dengan residual pada periode tahun sebelumnya. Adapun cara untuk mengatasi masalah autokorelasi yaitu dilakukan dengan menambah lag variabel terikat Y1 yaitu Y_{t-1} pada

model regresi (Ramandei et al. 2020). Model ini terutama dilakukan dalam kasus autokorelasi yang disebabkan oleh *lagged response*.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Obs*R-Squared	Prob. Chi-Square(2)
2.367567	0.3061

Sumber: Hasil olah data EViews 10

Berdasarkan pada hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai probabilitas Fhitung sebesar 0.3061, karena probabilitas Fhitung lebih besar dari tingkat alpha 0.05, maka artinya telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai VIF antar variabel berada di bawah 10. artinya model telah bebas dari permasalahan multikolinieritas, dan begitu pula sebaliknya. Berikut ini tersaji hasil pengujiannya.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Centered VIF
C	-
D(LN_AK)	1.001654
D(PDD)	1.092294
D(LN_UM)	1.029882
D(LN_PDB)	1.070857

Sumber: Hasil olah data EViews 10

Setelah dilakukan *treatment first difference*, hasil VIF antar variabel berada di bawah dari angka 10. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pada model regresi sudah tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen terdapat korelasi yang linear atau tidak. Pada hasil uji linearitas nilai prob.F terlihat pada baris F-statistic kolom probability. Dalam penelitian ini nilainya $0.1502 > 0.05$, maka bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi telah terpenuhi pada asumsi linearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

Prob. F-Statistic	0.7541
-------------------	--------

Sumber: Hasil olah data EViews 10

B. Model Regresi Linier Berganda

Model *Ordinary Least Square* (OLS) yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu guna mengetahui hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil estimasi OLS variabel angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto terhadap pengangguran di Indonesia.

Tabel 6. Model Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-61.70844	29.64155	-2.081822	0.0473
LN_AK	4.206061	1.719118	2.446638	0.0215
PDD	-2.512549	0.425982	-5.898253	0.0000
LN_UM	0.350030	0.140572	2.490047	0.0195
LN_PDB	-0.285235	0.174836	-1.631442	0.1149

Sumber: Hasil olah data EViews 10

Berdasarkan pengelolaan data time series yang diperoleh di atas bahwa dapat dihasilkan persamaan untuk pengangguran, yaitu sebagai berikut:

$$\text{LN_Pengangguran} = -61.70844 + 4.206061 \text{ LN_AK} - 2.512549 \text{ PDD} + 0.350030 \text{ LN_UM} - 0.285235 \text{ LN_PDB} + e$$

Dari persamaan regresi linier yang terlampir di atas, maka dapat diberikan penjelasan seperti berikut ini:

- Konstanta menghasilkan angka -61.70844 yang menunjukkan jika variabel bebas angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto bernilai konstan, maka variabel terikat pengangguran sebesar -61.70844.
- Koefisien regresi variabel angkatan kerja (X1) bernilai positif sebesar 4.206061 berarti jika kurs bertambah sebesar 1 satuan, maka pengangguran meningkat sebesar 4.206061.
- Koefisien regresi variabel pendidikan (X2) bernilai negatif sebesar -2.512549 berarti jika pendidikan bertambah sebesar 1 satuan, maka pengangguran menurun sebesar 2.512549.
- Koefisien regresi variabel upah minimum (X3) bernilai positif sebesar 0.350030 berarti jika upah minimum bertambah sebesar 1 satuan, maka pengangguran meningkat sebesar 0.350030.
- Koefisien regresi variabel produk domestik bruto / PDB (X4) sebesar -0.285235 berarti jika produk domestik bruto bertambah sebesar 1 satuan, maka pengangguran menurun sebesar 0.285235.

C. Koefisien Determinasi

Koefisien *R-Squared* dan *Adjusted R-Squared* memiliki tujuan yaitu guna melihat sejauh mana variasi variabel bebas bisa menjelaskan dengan baik terhadap variasi variabel terikat.

Tabel 7. Hasil Uji *R-Squared* dan *Adjusted R-Squared*

R-Squared	0.899659
Adjusted R-Squared	0.884222

Sumber: Hasil olah data EViews 10

Berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel 7 terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 0.899659. Hal ini bermakna variabel terikat pengangguran dapat dijelaskan oleh variabel bebas angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto sebesar 89.96%, sedangkan sisanya sebesar 10.04% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian

ini. Sementara itu, nilai *Adjusted R²* sebesar 0.884222, artinya adalah variabel pengangguran dapat dijelaskan sebesar 88.42% oleh variabel bebas angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto, sedangkan sisa persentase lainnya sebesar 11.58% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran

Merujuk pada hasil regresi, jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Semakin pesatnya pertumbuhan angkatan kerja tanpa diiringi pertumbuhan lapangan kerja baru akan mengakibatkan akumulasi kuantitas penganggur di Indonesia bertambah tiap tahunnya. Hasil serupa juga ditemukan pada studi sebelumnya dari Maravian (2015) yang menyatakan angkatan kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Menurut Keynes (1936), pengangguran di pasar tenaga kerja dianggap sebagai fenomena struktural dimana ditemukan adanya indikasi persenjangan antara total lowongan kerja dengan pencari kerja atau angkatan kerja yang ingin bekerja. Faktor geografis, sejarah, serta diskriminasi berdasarkan suku, jenis kelamin, dan umur merupakan aspek yang diketahui sebagai pemicu gejala struktural ini (Setiawan, Muchtar, dan Muafiqie 2017). Teori Keynes ini selaras dengan kondisi nyata yang dialami Indonesia dimana faktor pemicu eskalasi pengangguran adalah persebaran kesempatan kerja yang tidak merata dimana peluang kerja di wilayah perkotaan lebih banyak daripada perdesaan. Hal ini membuat banyak masyarakat pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan membuat tingginya jumlah pengangguran di wilayah perkotaan.

Fenomena struktural lain yang mempengaruhi tingginya pengangguran adalah masih terdapatnya diskriminasi terhadap angkatan kerja perempuan seperti pemberian upah yang rendah, tindakan kekerasan, hingga kasus pemaksaan pensiun sebelum waktunya. Diskriminasi ini terjadi karena adanya pola pikir bahwa kedudukan perempuan hanya sebatas pelengkap kaum laki-laki sehingga perannya tidak terlalu dipertimbangkan (BPS, 2020). Sementara itu, menurut data Sakernas persentase tenaga kerja perempuan yang berada pada sektor informal cukup tinggi. Persentase tenaga kerja perempuan yang berusaha di sektor informal sebesar 60,69%, sedangkan persentase tenaga kerja laki-laki terhitung 52,61% di tahun 2019. Kecenderungan perempuan masuk ke dalam pekerjaan informal lantaran masih acap kali ditemukan hambatan bagi kaum perempuan dalam mengakses pekerjaan formal. Meski demikian, persentase tenaga kerja informal di kedua jenis kelamin ini menurun secara perlahan setiap tahunnya. Perspektif kaum perempuan sebagai pemeran peran domestik masih sangat kental, sehingga hal ini menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam ekonomi.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil regresi, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka dapat menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Temuan ini tidak senada dengan penelitian Turay, dkk (2021) yang menyebutkan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Di sisi lain, hasil uji ini didukung oleh penelitian dari Zulhanafi, dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa pendidikan punya pengaruh positif terhadap keproduktifan pekerja di Indonesia. Kondisi ini menjelaskan tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh calon tenaga kerja mampu memecahkan kondisi pengangguran yang problematik sebab dengan pendidikan masyarakat akan mempunyai pola pikir kritis, pandangan yang maju, dan

motivasi yang tinggi. Keadaan ini secara otomatis akan mendorong kinerja tenaga kerja dan menambah produktivitas. Begitu juga kebalikannya, bila tingkat pendidikan suatu individu kurang memadai, maka pola pikir menjadi kurang terarah, tidak mampu menyikapi dan mengkritisi hal-hal yang bersifat tidak lumrah, semangat kerja rendah, serta motivasi tidak bagus dan berdampak terhadap rendahnya kinerja. Kinerja yang menurun mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas dan meningkatkan jumlah penganggur.

Namun, faktanya tingkat pendidikan yang terus mengalami peningkatan masih belum dapat mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada Tabel 1 yang menunjukkan jumlah pengangguran yang berfluktuasi dan cenderung meningkat selama tahun 1990-2020 di Indonesia. Fakta tersebut berlawanan dengan teori *Human Capital* dimana dibahas dengan adanya indikator pendidikan, tingkat produktivitas tenaga kerja dapat meningkat sebab melalui pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan untuk memproduksi output.

Fenomena di atas disebabkan lantaran tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah dan SMP masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, sedangkan pekerja dengan tingkat pendidikan menengah hingga perguruan tinggi yang tertampung di pasar tenaga kerja terbilang cukup rendah. Pada tahun 2020, tenaga kerja di Indonesia tamatan SD ke bawah hampir 40 persen. Meski demikian, persentase tenaga kerja lulusan SD ke bawah perlahan mengalami kemerosotan dari 42,20% di tahun 2016 menurun jadi 38,89% pada tahun 2020. Distribusi terbesar kedua adalah tenaga kerja lulusan SMA, yaitu sebesar 30,15% pada tahun 2020. Distribusi terbesar ketiga adalah penduduk bekerja lulusan SMP atau sederajat, yaitu sebesar 17,93%. Sementara itu distribusi tenaga kerja lulusan diploma dan universitas pada tahun 2020 masing-masing hanya mencapai 2,79% dan 10,24%. (BPS, 2020).

Seiring berjalannya waktu, pekerja tamatan universitas relatif naik pada tahun 2016-2020. Tahun 2016 dan 2017, persentase tenaga kerja lulusan universitas stabil di angka 9,36%. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 9,40% hingga pada tahun 2020 tercatat pekerja lulusan universitas mengalami kenaikan tajam hingga 10,24%. Hal ini disebabkan dalam beberapa tahun terakhir perkembangan perekonomian memberikan tantangan yang cukup besar yang berakhir pada tuntutan daya saing yang tinggi. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk menyerap tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk menjaga eksistensi dalam persaingan yang kian sengit ke depannya. Oleh sebab itu, perusahaan memilih merekrut tenaga kerja yang memiliki capaian pendidikan yang memadai sebagai cerminan dari kapabilitas dan reliabilitas yang tinggi bagi perusahaan.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Menurut hasil regresi, upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap angka pengangguran di Indonesia dimana ketika upah minimum naik alhasil terjadi peningkatan pengangguran. Keterhubungan antara upah minimum dan pengangguran ini tidak selaras dengan penelitian Sembiring dan Sasongko (2019) yang menyebutkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Di sisi lain, hasil penelitian yang berbeda atau mendukung hasil penelitian ini berasal dari pengamatan Suhendra dan Wicaksono (2016) yang mengungkapkan upah positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kondisi ini mengindikasikan kenaikan rerata upah minimum di Indonesia akan mengakibatkan naiknya jumlah penganggur dalam suatu wilayah.

Hasil penelitian ini hampir sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, peningkatan upah yang terus terjadi di Indonesia tiap tahunnya

berimplikasi terhadap naiknya angka pengangguran di Indonesia. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan data yang dimuat pada Tabel 1 yang menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia yang berfluktuasi dan cenderung meningkat selama tahun 1990-2020. Peristiwa ini sesuai dengan teori dari Keynes yang mengatakan penetapan upah di atas keseimbangan permintaan dan penawaran akan membuat perusahaan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja dan menurunkan perputaran tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Namun, belakangan ini masih terdapat banyak temuan terkait penyelewengan dengan upah yang dialami para pekerja dimana upah diberikan dibawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penyelewengan ini terjadi karena masih banyak perusahaan tidak patuh pada aturan UMK akibatnya hubungan industrial yang terjalin menjadi tidak harmonis. Persoalan upah yang terjadi saat ini dapat dikatakan tengah dalam kondisi yang krusial dan juga berdampak kepada semua kalangan sebab bila buruh diberikan upah tidak layak, tak saja memengaruhi daya beli, tetapi juga berefek terhadap standar kehidupan para buruh serta keluarganya (Hastyorini 2019).

Selain itu, kesenjangan nilai upah yang diterima antara pekerja di daerah perdesaan dan pekerja di daerah perkotaan perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 2019, rata-rata upah pekerja di daerah perkotaan sudah mencapai Rp.3,01 juta, sedangkan rata-rata upah pekerja di daerah perdesaan hanya mencapai Rp.1,96 juta. Kondisi kesenjangan ketenagakerjaan ini akan berdampak pada cenderungnya perpindahan penduduk perdesaan ke daerah perkotaan. Kondisi ini tentu akan menyebabkan tingginya pengangguran di perkotaan. Tidak hanya itu, wilayah perdesaan juga akan kehilangan potensi sumber daya manusia yang akan meningkatkan kemajuan ekonomi daerahnya.

Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran.

Merujuk pada hasil penelitian ini, produk domestik bruto tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Hal ini disebabkan peningkatan PDB menurut pengeluaran (*expenditure*) yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah selaku pelaku ekonomi belum mampu memberikan andil dalam peningkatan produktivitas pekerja. Keadaan ini dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir dimana tidak luput dari kemajuan zaman maupun perubahan perilaku daripada pelaku ekonomi.

Lebih lanjut, keseluruhan nilai tambah (PDB) yang dihasilkan sebagian besar dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi. Secara terperinci, PDB yang diciptakan di wilayah domestik Indonesia serta produk impor sebagian besar masih digunakan untuk mencukupi konsumsi akhir rumah tangga (RT), bahkan meskipun terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 yang menimbulkan guncangan ekonomi di seluruh negara, konsistensi porsi pengeluaran konsumsi RT di Indonesia terhadap PDB justru semakin baik dan tembus di angka 57,66% meningkat sebanyak 1,03% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 56,63% terhadap PDB (Badan Pusat Statistik 2021).

Pada penelitian ini, koefisien PDB menghasilkan nilai -0.285235 artinya apabila PDB meningkat sebanyak 1 satuan, jumlah pengangguran akan turun sebesar -0.285235 satuan. Adapun arah koefisien PDB pada hasil pengujian ini telah sesuai dengan konsep Hukum Okun dimana peningkatan PDB berkontribusi bagi penurunan jumlah pengangguran di suatu negara, namun sehubungan dengan nilai probabilitas PDB yang tidak menyatakan hasil signifikan, penelitian ini menepis asumsi jika perspektif Hukum Okun berlaku di Indonesia.

Meskipun demikian, variabel PDB lantas tidak dapat terabaikan begitu saja sebab pada siklus bisnis, pengangguran bergerak berbarengan dengan output. Oleh sebab itu, supaya jumlah penganggur tidak semakin bertambah maka PDB mesti ditingkatkan setinggi-tingginya.

Hasil daripada studi ini tidak searah dengan penelitian Eef Saefulloh & Renjana Fitriana (2017) dan Rosalendro Eddy Nugroho (2016) yang memperoleh hasil PDB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Sementara di sisi yang berbeda, penelitian dari Sabir dan Naz (2015) mendukung hasil pengujian ini. Penelitian tersebut mengungkapkan jika PDB tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kuantitas pengangguran.

Hasil penelitian ini sesungguhnya selaras dengan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, tingkat pengangguran Indonesia cenderung terus meningkat seiring meningkatnya PDB yang dapat ditunjukkan pada Tabel 1 dimana *trend* jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sejak tahun 1990-2020. Secara teori, fenomena ini bertentangan dengan konsep Hukum Okun.

Fenomena ini dapat terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif pada sebagian besar provinsi di Indonesia tidak disertai kemajuan kemampuan produksi. Selain itu, naiknya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun hanya berfokus pada orientasi industri padat modal daripada berorientasi pada padat karya. Dalam praktiknya, proses pelaksanaan produksi di industri padat modal lebih memilih menggunakan alat-alat canggih dalam jumlah yang banyak dan lebih sedikit memanfaatkan tenaga kerja manusia akibatnya jumlah pengangguran terus mengalami kenaikan (Wardiansyah, Yulmardi, dan Bahri 2016).

KESIMPULAN

Angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan lantaran banyaknya angkatan kerja tidak sepadan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah angkatan kerja terhadap kesempatan kerja. Apabila penyerapan angkatan kerja yang siap bekerja belum berjalan optimal, jumlah penganggur akan semakin bertambah dan berdampak pada aspek krusial sosial ekonomi suatu negara.

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan berbanding lurus dengan keahlian atau kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pula keahlian atau kompetensi untuk mendapatkan atau melakukan suatu pekerjaan. Jika tingkat pendidikan suatu negara tinggi maka hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Upah minimum memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan lantaran kenaikan tingkat upah menimbulkan kenaikan biaya produksi hingga tingginya harga produk yang dihasilkan. Kenaikan harga produk berdampak pada turunnya tingkat penjualan dan membuat perusahaan atau produsen mengurangi permintaan tenaga kerja dan menambah jumlah pengangguran.

Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa PDB belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap persoalan pengangguran di Indonesia sebab peningkatan PDB tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi alhasil penuntasan masalah pengangguran tidak dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. *PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2016-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Benny, Jimmy. 2013. "Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia." *Jurnal EMBA* 1 (4): 1406–15.
- Davidson, Paul. 2007. "John Maynard Keynes - Great Thinkers in Economics."
- Fitri, dan Junaidi. 2016. "Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi." *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* V(1): 26–32.
- Hastyorini, Irim Rismi. 2019. *Masalah Ketenagakerjaan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi 6. Jakarta: Jakarta: Erlangga.
- . 2018. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi 7. Jakarta: Jakarta: Salemba Empat.
- Maravian, Bimo, Ach Qosjim, dan Siti Khomariyah. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1986 – 2013." *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62102>.
- Nugroho, Rosalendro Eddy. 2016. "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014." *Jurnal PASTI* Volume X: hlm 177-191.
- Ramandei, Pilipus, Abdul Rohman, Dwi Ratmono, dan Imam Ghazali. 2020. "Interactions of Financial Assistance and Financial Reporting Competency: Evidence From Local Government in Papua and West Papua Indonesia." *International Journal of Financial Research* 11 (1): 1–12.
- Ryan Z, R. Achmad, Nanik Istiyani, dan Anifatul Hanim. 2017. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur." *e-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* IV (2): 187–91. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5826>.
- Saefulloh, Eef, dan Renjana Fitriana. 2017. "Pengaruh Inflasi, Pdb, Investasi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1999-2015." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 91. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1626>.
- Setiawan, Denis, Muchtar, dan Humaidah Muafiqie. 2017. "Faktor-Faktor Determinan yang Berpengaruh Pada Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2000-2016." *Journal of Public Power* 1 (1): 1–16.
- Suhendra, Indra, dan Bayu Hadi Wicaksono. 2016. "Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ekonomi-Qu* 6 (1): 1–17. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4143>.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, Tulus T.H. 2018. *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Jakarta: Erlangga.
- Tutupoho, Ali. 2019. "Analisis Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota)." *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi* XIII (2): 71–94.

-
- Wardiansyah, M, Yulmardi, dan Zainul Bahri. 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera).” *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 5 (1): 13–18.